

ABSTRAK

Tri Saputra “Analisis Manajemen Pelimpahan Porsi Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Tahun 2025”

Pelimpahan porsi haji merupakan kebijakan administratif untuk mengalihkan hak nomor porsi jemaah yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada ahli waris sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan daftar tunggu haji yang panjang, Kota Bogor memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pelimpahan porsi haji.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan pelimpahan porsi haji yang meliputi alokasi kuota, penentuan penerima, pengelolaan daftar tunggu dan kuota sisa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berlandaskan paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori POSDCORB sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelimpahan porsi haji telah dilaksanakan dengan baik melalui penetapan tujuan pelayanan, pemetaan calon jemaah, koordinasi lintas instansi, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan aplikasi SISKOHAT, meskipun peningkatan kompetensi sumber daya manusia masih diperlukan. Transparansi diterapkan melalui kepatuhan terhadap SOP, keterbukaan informasi, dan pelayanan tanpa biaya, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas berbasis Surat Keputusan, pemeriksaan dokumen berlapis, evaluasi dan pelaporan rutin, penggunaan kartu kendali, serta koordinasi berjenjang. Kendala yang masih dihadapi meliputi ketidaksesuaian data administrasi dan penjadwalan biometrik. Secara keseluruhan, pelaksanaan pelimpahan porsi haji di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor telah menerapkan fungsi manajemen POSDCORB sehingga pelayanan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pelimpahan Porsi Haji; Transparansi; Akuntabilitas.